



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Morotai**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Galela, 05 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Desa Gorua Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

***m e l a w a n***

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 07 September 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN HALMAHERA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **17 Juli 1996**, dengan wali nikah Pegawai KUA (**Rahim Laha**) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama: **Mansur** dan **Hamid** serta mahar berupa uang Rp.100.000 akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Jejaka dan Gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, selama 6 bulan. Kemudian akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama 1 tahun. Lalu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman Bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da duhul*) dan hingga kini telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **Nur Anisa Din**, Perempuan, Gorua, 01 Januari 2005, usia 19 tahun;
  - 4.2 **Rijaldi Abubakar**, laki-laki, Gorua, 04 Mei 2012, usia 12 tahun;
  - 4.3 **Nur Akila Din**, Perempuan, Gorua, 21 Mei 2018, usia 6 tahun;(ketiga anak dalam asuhan Tergugat);
5. Bahwa sejak tahun 2004, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
  - 5.1 Tergugat sering selingkuh dengan perempuan yang berbeda bada;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat;

5.3 Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024, Tergugat memukul Penggugat hingga tidak sadarkan diri. Disebabkan Karena Penggugat pulang ke rumah (menjenguk) orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx tanpa sepengetahuan Tergugat;

7. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang Penggugat di Alamat xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat KABUPATEN HALMAHERA UTARA;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**TERGUGAT**) dengan (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan di **Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara** pada tanggal **17 Juli 1996**;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Hakim Burnato bin Habrun Bornato**, tempat dan tanggal lahir Saluta, 15 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 006 RW 006 Desa Saluta Kecamatan Galela Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Sepupuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sirri di rumah kediaman orang tua Pengguga di Desa Iglobula, Kecamatan Galela Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 17 Juli 1996 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,-dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi menjadi Wali nikah Penggugat adalah Pegawai KUA yang bernama **Rahim Lata** sekaligus yang mengijabkannya, dikarenakan ayah kandung Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui saksi nikah adalah **Mansur** dan **Hamid**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Maftutu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore kemudian pindah dirumahmilik bersama di Desa Gorua;
- Bahwa saksi mengetetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menjalani rumah tangga tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sejak tahun 2004, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat hingga pingsan dikarenakan Penggugat menjenguk orang tuanya yang sedang sakit tanpa sepengetahuan Tergugat dan hal itu yang menjadi puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Saluta, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Hairun Bornato bin Habrun Bornato**, tempat dan tanggal lahir Saluta, 18 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Saluta Kecamatan Galela Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sirri di rumah kediaman orang tua Pengguga di Desa Iglobula, Kecamatan Galela Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 17 Juli 1996 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,-dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi menjadi Wali nikah Penggugat adalah Pegawai KUA yang bernama **Rahim Lata** sekaligus yang mengijabkannya, dikarenakan ayah kandung Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui saksi nikah adalah **Mansur** dan **Hamid**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Maftutu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore kemudian pindah dirumahmilik bersama di Desa Gorua;
- Bahwa saksi mengetetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menjalani rumah tangga tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sejak tahun 2004, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat hingga pingsan dikarenakan Penggugat menjenguk orang tuanya yang sedang sakit tanpa sepengetahuan Tergugat dan hal itu yang menjadi puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Saluta, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Istbat Nikah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hakim Burnato bin Habrun Bornato** dan **Hairun Bornato bin Habrun Bornato** yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 147 HIR/172 Rbg,

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 144 Ayat (2) HIR dan 169 Rbg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus Jejaka dan Perawan, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR/196 Rbg dan Pasal 172 HIR.193 Rbg;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat *formil* dan *materil*, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **17 Juli 1996**, dengan wali nikah Pegawai KUA (**Rahim Laha**) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama: **Mansur** dan **Hamid** serta mahar berupa uang Rp.100.000;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pegawai KUA dikarenakan ayah kandung beragama Kristen dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama: **Mansur** dan **Hamid**;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:

a. **Nur Anisa Din**, Perempuan, Gorua, 01 Januari 2005, usia 19 tahun;

b. **Rijaldi** Abubakar, laki-laki, Gorua, 04 Mei 2012, usia 12 tahun;

c. **Nur Akila** Din, Perempuan, Gorua, 21 Mei 2018, usia 6 tahun;

(ketiga anak dalam asuhan Tergugat);

7. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat membutuhkan buku nikah untuk keperluan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan para Pemohon dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Majelis Hakim perlu mengemukakan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 (dua) orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada Tanggal **17 Juli 1996**, Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali Pegawai KUA karena ayah kandung Penggugat beragama Kristen dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama: **Mansur** dan **Hamid**, 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Penggugat telah menyerahkan secara tunai kepada Tergugat mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga guna kepentingan perceraian serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan;**

## **Dalam Gugatan Cerai**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

*Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan isbat cerai adalah bahwa Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, Tergugat suka bermain perempuan, akibatnya dari perilaku Tergugat yang tidak baik Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah untuk perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Hakim Burnato bin Habrun Bornato** dan **Hairun Bornato bin Habrun Bornato** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga anak, dalam asuhan Tergugat;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan yang berbeda beda, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut yang puncaknya pada february 2024, Tergugat memukul Penggugat hingga tidak sadarkan diri. Disebabkan Karena Penggugat pulang ke rumah (menjenguk) orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx tanpa sepengetahuan Tergugat;
5. Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya serta sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan baik secara kekeluargaan maupun di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطابق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Fikram Ngolomasarani bin Kasman Ngolomasarani) terhadap Penggugat, (Nur Purnamasari Salamun binti Salamun Palue);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار  
قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-  
١٤٩)

Artinya : "*Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir;

**Dalam Isbat Nikah**

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Isbat nikah dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara (**PENGGUGAT**) dengan (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Desa Gotalamo, pada tanggal **17 Juli 1996**;

## **Dalam Gugatan Cerai**

4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
5. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
6. Membebankan biaya perkara Prodeo pada DIPA\_04 Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk dengan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**  
Panitera Sidang,

**Nirwani Kotu, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	850.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)